GANDENG OMBUDSMAN, PEMKAB SINJAI TINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Rabu, 25 November 2026 - Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan

KABARSINJAI.COM - Optimalisasi pengelolaan pengaduan masyarakat menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Pemkab Sinjai bekerja sama dengan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan menggelar workshop pengelolaan pengaduan masyarakat di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai, Selasa (24/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 24-25 November 2026, ini membahas penguatan mekanisme penanganan aduan masyarakat, mulai dari proses penerimaan, tindak lanjut hingga penyelesaian pengaduan di masing-masing perangkat daerah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sinjai, Andi Jefrianto Asapa, yang membuka kegiatan tersebut, menekankan pentingnya perubahan pola pikir aparatur dalam menyikapi setiap laporan masyarakat.

Menurutnya, pengaduan tidak seharusnya dianggap sebagai beban ataupun ancaman bagi instansi pemerintah. Sebaliknya, aduan merupakan sumber informasi dan bahan evaluasi untuk mengetahui kekurangan dalam pelayanan sekaligus menjadi kesempatan melakukan perbaikan.

"Aduan masyarakat bukan beban, namun kesempatan untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Karena pelayanan yang baik adalah wajah pemerintah yang sesungguhnya," ungkap Andi Jefrianto.

Ia berharap, melalui workshop ini, aparatur pemerintah semakin memahami pentingnya memberikan respons yang cepat dan tepat terhadap setiap pengaduan yang disampaikan masyarakat.

Andi Jefrianto juga menyebut kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari kerja sama atau MoU antara Pemkab Sinjai dan Ombudsman dalam mendorong penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas serta bebas dari praktik maladministrasi.

Sementara itu, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Dr. Aswiwin Sirua, mengingatkan agar materi yang diperoleh peserta tidak berhenti sebatas pemahaman selama workshop.

Ia mendorong setiap perangkat daerah menerapkan pengetahuan tersebut dalam memperbaiki sistem pengelolaan pengaduan di instansi masing-masing.

Menurutnya, keberhasilan pengelolaan pengaduan tidak hanya diukur dari tersedianya saluran laporan, tetapi juga dari keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti hingga menyelesaikan setiap aduan masyarakat.

Workshop ini diikuti para sekretaris perangkat daerah, kepala subbagian umum dan kepegawaian, pengelola pengaduan rumah sakit, serta admin pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik lingkup Pemkab Sinjai. Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten Muda II Ombudsman RI Sulsel, Hasrul Eka Putra. (**)